



Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi Ekonomi di Indonesia

Jhon Maxwell Yosua Pattinussa

INSTITUSI/ AFILIASI

Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pelita Harapan, Jakarta,
Indonesia.

KORESPONDENSI

MH Thamrin Boulevard 1100, Klp. Dua,
Kec. Klp. Dua, Kota Tangerang, Banten
15811/Universitas Pelita Harapan
Email: jhon.yosua@uph.edu

ABSTRACT

The interactions between countries today are almost based on the interests of capital accumulation, particularly with the increase in new regionalism worldwide as if forcing the world's nations to join or be left behind. Indonesia also encounters such circumstances and should respond to new challenges in global politics by taking a free and active stance using economic diplomacy as one of its main instruments. This article, using individual-level analysis, attempts to explain how President Joko Widodo strongly influences the increasing role of economic diplomacy. It also provides an overview of the relationship between political personality and the perception of President Widodo with economic diplomacy by adopting the rational actor model-foreign policy decision-making process. This article identified four critical things in strengthening the role of economic diplomacy for Indonesia: 1) changing interests in the reality of modern state interactions; 2) the possibility of taking policy alternatives; 3) individual analysis (leader) in seeing the risks and opportunities; 4) decision-making by the President.

KEYWORDS

Diplomacy; Indonesia; International Politics; Joko Widodo

PENDAHULUAN

Setelah berakhirnya perang dingin pada tahun 1991, negara-negara di seluruh dunia menghadapi perubahan iklim politik internasional atau biasa dikenal dengan *paradigm shift*, dan angin demokrasi-kapitalisme yang dibawa oleh Amerika Serikat yang pada saat itu menjadi negara hegemoni tunggal sangat kuat pengaruhnya. Tiap negara perlahan namun pasti dituntut untuk lebih terbuka akibat dari perubahan tersebut. Hal ini mendorong keterbukaan pasar dan batasan-batasan negara guna meningkatkan akumulasi kapital pada perdagangan/ perekonomian kawasan dan internasional. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah regionalisme baru (regionalisme pasca perang dingin, yang memiliki tujuan utama pada kerja sama ekonomi).

Proses globalisasi menimbulkan tantangan tersendiri bagi tiap negara untuk menjawab permasalahan tersebut sesuai dengan karakteristik dan tujuan tiap negara. Disiplin ilmu Hubungan Internasional setidaknya menyediakan dua kalsifikasi terhadap orientasi negara yang mungkin menjadi alternatif bagi pemerintah sebuah negara dalam menghadapi tiap perubahan dinamika global yang terjadi. Pilihan pertama adalah orientasi politik Nasionalisme, dimana negara-negara mengandalkan instrumen dan lingkup domestik untuk memenuhi kebutuhan negara.

Orientasi politik nasionalisme dapat dicirikan dengan enam karakteristik utama, yaitu: (1) kebijakan

yang diambil oleh negara berfokus pada pengaturan dalam negeri (*inward looking*); (2) tujuan utama dari pengambilan kebijakan adalah untuk mereformasi/ membangun iklim politik dalam negeri (*nation-building*); (3) sistem politik berpusat kepada negara, bahkan dalam kondisi paling ekstrim seolah-olah dapat dikatakan bahwa segala sesuatu ada untuk negara (*totalitarian political system*); (4) sistem ekonomi negara tersebut diatur dan dipergunakan untuk kepentingan negara saja (*centralistic economic system*); (5) negara akan memenuhi kebutuhannya secara mandiri, karena tidak percaya pada sistem perdagangan internasional (*self-sufficient economy*); (6) negara dengan orientasi politik nasionalisme akan melihat *new regionalism* dan sistem internasional sebagai ancaman (Rourke, 2008).

Pilihan kedua adalah orientasi politik Globalisme, dimana perbedaan dipetakan menjadi enam karakteristik utama, yaitu: (1) keputusan yang diambil negara akan mendorong kerja sama internasional/antar negara; (2) negara dengan orientasi politik globalisme akan berfokus pada pembangunan ekonomi; (3) kebanyakan negara-negara yang memiliki orientasi politik Globalisme menganut sistem demokrasi; (4) pasar menjadi pusat sistem ekonomi yang dianut; (5) dalam pemenuhan kebutuhan domestik negara lebih mengandalkan pasar internasional; (6) negara melihat sistem internasional sebagai kesempatan dan peluang (Rourke, 2008). Namun, orientasi politik global sebuah negara

tidak terjadi dengan sendirinya atau tanpa perubahan. Orientasi politik global sebuah negara entah bersifat nasionalisme atau globalisme banyak dipengaruhi oleh kepala pemerintahan sebuah negara. Hal ini dimungkinkan karena keputusan kepala pemerintahan negara-negara modern sangat mempengaruhi struktur negara dalam konteks hubungan luar negeri.

Pemerintah Indonesia dapat dilihat sebagai salah satu negara yang mengalami banyak perubahan orientasi politik global dalam menjawab dinamika politik internasional sejak masa perang dingin sampai sekarang. Idealisme, pemikiran, visi dan misi kepala pemerintahan akan sangat mempengaruhi hal tersebut karena seorang pemimpin menurunkan cita-cita dan pemikirannya pada bawahannya (Maxwell, 2016). Sebagai contoh, keputusan perang sebuah negara ditentukan oleh kepala pemerintahan. Perang ditentukan oleh individu yang memimpin, bukan kepada gambaran menyeluruh mengenai kondisi domestik atau internasional belaka. Visi dan Misi kepala pemerintahan akan sangat mempengaruhi pendekatan, keputusan, dan arah pergerakan negara dalam dunia internasional (co: Adolf Hitler, memulai perang dunia ke-II) (Waltz, 1959).

Tiap masa memiliki dinamika dan permasalahan politik internasional yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana dinamika dan bagaimana pendekatan yang dibawa oleh para pemimpin

pemerintahan yang mencoba untuk menjawab permasalahan tersebut demi kepentingan nasional. Misalnya pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, permasalahan politik internasional pada saat itu adalah perang dingin antara Uni Soviet (sosialisme-komunis) dan Amerika Serikat (liberalisme-demokrasi). Pada masa itu, Indonesia menjawab tantangan tersebut dengan menggunakan orientasi politik globalisme yang ditandai dengan partisipasi Indonesia dalam pembentukan ASEAN pada tahun 1967 silam.

Ketika itu ASEAN merupakan formulasi dari kerja sama lima negara di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia merupakan salah satunya. Tujuan awal dibentuknya ASEAN adalah untuk menahan laju komunisme di kawasan (*old regionalism*). Namun, ASEAN pada masa akhir perang dingin hanya merupakan bentuk *bargaining power* bagi negara-negara anggota untuk bernegosiasi dengan kekuatan barat (re: Amerika Serikat) (Buszynski, 1992). Bagi Indonesia, ASEAN merupakan instrumen pendukung dalam menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif antara kekuatan hegemoni dari era perang dingin sampai sekarang (Jenkins, 2010). Orientasi globalisme pada masa Soeharto juga dapat dilihat melalui keterlibatan Indonesia dalam pasar internasional dan mulai dibukanya pasar domestik bagi para pelaku internasional.

Orientasi globalisme juga dapat dilihat pada masa kepemimpinan

Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa itu, masalah utama Indonesia adalah pemulihan pasca reformasi dan krisis Asia pada tahun 1997 silam. Kejatuhan 'macan Asia' (sebutan Indonesia pada era Soeharto) menjadi permasalahan utama dari pemerintahan Abdurrahman Wahid sehingga beberapa peneliti mengatakan bahwa tujuan utama politik luar negeri Indonesia ketika itu adalah "meyakinkan dunia bahwa Indonesia masih ada" (Lesmana, 2008). Dalam kurun waktu kurang dari dua tahun Presiden Abdurrahman Wahid mengadakan kunjungan kenegaraan lebih dari 100 kali. Pemerintahan waktu itu berusaha untuk terlibat aktif dan memberikan kontribusi terhadap komunitas internasional.

Beberapa kunjungan luar negeri Presiden ditujukan untuk: pemulihan ekonomi Republik Indonesia (RI); pemulihan hubungan RI dengan negara-negara di Timur Tengah (hingga muncul keputusan paling kontroversial dalam sejarah kepresidenan RI yaitu keputusan untuk membuka hubungan diplomatik RI-Israel); memperkuat hubungan Indonesia-Australia dan menjaga stabilitas kawasan Pasifik (DPR-RI, 2001). Berikutnya, pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri politik luar negeri Indonesia pada masa itu disebut sebagai program 'benah diri'. Program tersebut bertujuan untuk memberikan peran diplomatis pada semua sektor eksternal RI. Misalnya melibatkan masyarakat diaspora dalam upaya diplomasi publik. Pada masa ini,

pemulihan ekonomi pasca krisis 1998 masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah RI. Di sisi lain, pemerintah cukup kesulitan untuk pulih, karena negara-negara di kawasan sekitar RI masih mengalami kesulitan yang serupa.

Pada dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia memainkan peran yang cukup penting sebagai negara Islam-moderat di mata dunia. Permasalahan utama yang di garis bawahi oleh pemerintah adalah masalah intoleransi dan terorisme (re: pasca 9/11, serangan teroris di New York dan Washington DC). Orientasi politik globalisme menjadi jawaban pemerintah untuk membentuk citra positif Indonesia di mata dunia (pada saat itu masyarakat negara-negara barat sangat *islamophobic*). Selama dua periode pemerintahan SBY terbukti berhasil dengan jargon "*Thousand friends, zero enemy*". Sebagai rekonsiliator dalam upaya membentuk citra internasional positif, Indonesia turut aktif dalam mediasi konflik-konflik internasional (Lesmana, 2008).

Sebagai contoh adalah rekonsiliasi konflik Thailand dan Kamboja pada perebutan kuil Preah Vihear serta rekonsiliasi pemerintah dengan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005 silam. SBY terbukti berhasil membentuk pemerintah yang bersifat pro aktif dan *high profile*. Salah satu kutipan pidatonya yang paling terkenal adalah "*no country perceives Indonesia as an enemy and there is no country which Indonesia considers an*

enemy. Thus, Indonesia can exercise its foreign policy freely in all directions, having a million friends and zero enemies" (Alvian et al., 2018). Indonesia menggambarkan dirinya sebagai negara yang berdamai dan menerima siapapun sebagai teman.

Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2014-2019 silam juga menghadapi permasalahan politik internasional yang lebih kompleks dari masa sebelumnya, dan tentunya harus dihadapi dan ditangani dengan benar oleh pemerintah. Misalnya masalah kemiskinan, dan bahkan pemulihan Indonesia dari krisis 1998 yang tidak dapat diselesaikan oleh para Presiden sebelumnya masih menjadi permasalahan utama yang harus dijawab. Berdasarkan tinjauan yang telah penulis lakukan, diplomasi ekonomi mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Namun, apakah diplomasi ekonomi dapat memberikan jawaban dari permasalahan politik internasional saat ini?

Oleh sebab itu, tulisan ini mencoba untuk menjelaskan orientasi politik internasional Indonesia dan menjabarkan bagaimana proses pemilihan diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen utama bagi Indonesia dalam menghadapi masalah politik global terkini. Tulisan ini juga ingin melihat bagaimana Presiden Joko Widodo banyak mempengaruhi perubahan pendekatan politik luar negeri RI dari *high profile* khas SBY menjadi *low profile* pada masa pemerintahannya selama lima tahun pertama.

Penulis melihat bahwa terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia membawa perubahan besar, terutama dalam penguatan peran diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen utama kebijakan luar negeri RI. Dengan menggunakan pendekatan analisis individu, penulis berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh Presiden Joko Widodo terhadap penguatan peran diplomasi ekonomi. Menurut metode pengambilan keputusan/ pembuatan kebijakan *Rational Actor Model-Foreign Decision-Making Process*, setidaknya ada satu hal penting yang perlu diidentifikasi dari seorang pemimpin (Presiden) yaitu 'faktor keistimewaan'.

Maksud dari faktor keistimewaan sendiri adalah penilaian atau justifikasi pemimpin terhadap suatu isu dan bagaimana persepsi pribadi dapat mempengaruhinya. Lebih lanjut, penulis akan memberikan identifikasi obyektif terkait penalaran individu Presiden Joko Widodo terhadap diplomasi ekonomi dengan menggunakan empat variabel pokok *individual level analysis* yaitu *personality; ego and ambition; political history and personal experience; perception and operational reality*. Diakhir tulisan, pembaca dapat lebih memahami bagaimana keterkaitan dari peningkatan peran diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo.

TINJAUAN LITERATUR

Orientasi Politik Internasional Presiden Joko Widodo

Thu (2018) dalam jurnal berjudul *“Australian and ASEAN: Together for the sake of New Multipolar World Order”* menyatakan bahwa Joko Widodo merupakan salah satu tokoh vital di kawasan Asia Tenggara. Hampir semua hubungan diplomatis Indonesia dengan negara-negara di dalam kawasan dan regionalisme ASEAN merupakan hubungan transaksional. Oleh karena itu, Thu mengatakan bahwa pendekatan dan orientasi politik Joko Widodo adalah globalisme. Sejalan dengan Thu, Fitriani dan Panduwinata (2018) dalam laporannya yang berjudul *“Analisa Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015-2018)”* mengatakan bahwa peran Presiden Joko Widodo dalam mengarahkan kebijakan dan pendekatan departemen luar negeri RI sangat besar.

Salah satu contohnya adalah peningkatan peran diplomasi ekonomi yang menjadi pilar ke-2 dalam lima pilar utama kebijakan luar negeri RI. Lebih lagi, adanya pilar ke-3 mengenai perlindungan WNI di luar negeri; pilar ke-4 mengenai kerja sama ASEAN; pilar ke-5 merupakan diplomasi maritim yang mana menurut Fitriani dan Panduwinata semua menunjang diplomasi ekonomi sebagai pilar utama. Dengan kata lain, Presiden Joko Widodo hendak memastikan bahwa instrumen politik internasional Indonesia yaitu diplomasi ekonomi dapat berhasil menjawab

dinamika politik internasional.

Sejalan dengan Thu, Fitriani dan Panduwinata, Lundry (2018) dalam jurnal berjudul *“Assessing Indonesia’s Foreign Policy under Joko Widodo”* mengatakan bahwa spekulasi para pengamat politik internasional tentang Joko Widodo dan melihat pendekatan yang dilakukannya adalah isolasi atau menarik diri dari sistem internasional (berorientasi nasionalisme) terbukti tidak berdasar. Justru Lundry melihat bahwa pendekatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang terkesan nasionalisme, merupakan tindakan pemerintah untuk memberikan penegasan bahwa Indonesia sejajar dengan negara-negara tetangganya dan memiliki hak penuh untuk menentukan arah kebijakan luar negeri secara independen.

Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi yang dibangun oleh pemerintah Indonesia bersifat membumi. Sabaruddin (2019) dalam jurnal laporan berjudul *“Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi”* menjelaskan lebih terperinci mengenai diplomasi ekonomi yang dibangun oleh pemerintah, yaitu pemerintah mengharapkan semua diplomat dan seluruh aktor diplomasi Indonesia (termasuk masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri) menjadi ‘salesperson’ untuk Indonesia di luar negeri. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan diplomasi

ekonomi adalah seperti menjual potensi Indonesia, sebagai partner ekonomi yang lebih baik dari pada negara lain.

Diplomasi ekonomi menjadi salah satu bagian dari pilar penting diplomasi Indonesia. Ada lima pilar penting yang menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pilar pertama adalah keamanan dan kedamaian; kedua, diplomasi ekonomi; ketiga, perlindungan WNI di luar negeri; keempat, kerja sama ASEAN; dan pilar kelima adalah diplomasi maritime (Fitriani & Panduwinata, 2018). Dalam laporan analisis kinerja kementerian luar negeri yang diterbitkan oleh *Centre for Strategic and International Studies*, Vido Chandra melihat bahwa diplomasi ekonomi menjadi jangkar utama dalam sikap Indonesia di panggung internasional. Senada dengan Fitriani dan Panduwinata, Margiansyah (2020) dalam jurnal berjudul *“Revisiting Indonesia’s Economic Diplomacy In The Age of Disruption: Towards Digital Economy And Innovation Diplomacy”*, mengatakan bahwa di era Joko Widodo diplomasi ekonomi menjadikan Indonesia sebagai pemain aktif dalam konteks regional dan internasional dalam pengembangan inovasi ekonomi, dengan menggunakan instrumen diplomasi ekonomi sebagai instrumen utama untuk mendatangkan investor asing dan peningkatan kegiatan perdagangan internasional.

Individual Level Analysis

Rourke (2008) dalam buku berjudul

“International Politics on The World Stage” mengatakan bahwa analisis level individu dapat sangat membantu para pengamat politik internasional untuk mengidentifikasi arah atau jenis kebijakan sebuah negara yang akan berlangsung. Analisa tingkat individu menurut Rourke dapat memberikan gambaran penuh mengenai bagaimana keputusan ‘petinggi’ negara diambil dari sisi *personality, ego and ambition, political history, perceptions and operational reality*. Senada dengan Rourke, Waltz (1959) dalam buku berjudul *Man, “The State, and War”* mengatakan hal serupa. Waltz mengatakan bahwa dunia dan keputusan-keputusan yang merubah dunia kerap diambil berdasarkan keputusan seorang individu. Kendati demikian keputusan tersebut dapat mempengaruhi sebuah negara atau bahkan pola interaksi internasional. Oleh karena itu, Waltz dalam bukunya menyatakan bahwa analisis level individu berdasarkan karakteristik pemimpin dapat sangat membantu dalam melihat dan mencari tahu penyebab dalam suatu kejadian besar dalam sejarah dunia.

Sedikit berbeda dengan Rourke dan Watz, Mintz (2004) dalam jurnal berjudul *“How Do Leaders Make Decision? A Poliheuristic Perspective”* mengatakan bahwa individu pemegang kekuasaan tidak sepenuhnya berwenang dan dapat mengatur arah kebijakan luar negeri suatu negara. Ada banyak konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Tetapi Mintz

menyetujui bahwa disetiap kasus pengambilan keputusan dan penentuan arah kebijakan, kepala pemerintahan (pemimpin) tetap memiliki peran yang cukup besar. Setidaknya Mintz menggambarkan bahwa ada dua level pada proses pengambilan keputusan. Pertama adalah filterisasi kemungkinan dan berikutnya adalah konsiderasi. Menurut Mintz, kepala pemerintahan beserta dengan ideologinya mengambil peran besar dalam proses filterisasi/ penyederhanaan alternatif pilihan yang ada.

Berdasarkan studi-studi pustaka yang sudah dikumpulkan, penulis melihat bahwa diperlukannya identifikasi terhadap penguatan peran diplomasi ekonomi yang tengah digaung-gaungkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 RI. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini penulis akan menggunakan *individual level analysis* sebagai instrumen utama untuk melihat koneksinya.

METODE PENELITIAN

Penulis memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif karena dapat memberikan penulis ruang untuk memberikan interpretasi lebih dalam terhadap data pada suatu fenomena. Terlebih dalam menarik makna personal (analisa tingkat individu Joko Widodo) terhadap suatu isu, yang mana dalam tulisan ini adalah diplomasi ekonomi. Selain dari pada pendalaman interpretasi makna, pendekatan ini sesuai dengan data

kualitatif yang lebih mudah diakses oleh penulis, yaitu dokumen-dokumen, tulisan-tulisan terdahulu terkait topik, dan data-data kualitatif lainnya. Keterbatasan penulis dalam mengakses data primer juga merupakan salah satu faktor penentu, sehingga penulis harus memilih data-data yang dapat lebih mudah diakses. Hal ini ditujukan untuk mencapai analisa mendalam dan obyektif terkait topik. Terkait dengan data sekunder, Lamont (2015) mengatakan:

Data in IR is widely available and rapidly growing. In relation to secondary sources alone, there are an increasing number of online traditional and non-traditional media resources, electronic databases, and libraries that are all easily accessible to the researcher. As such, knowing where to begin data collection is as important as knowing what techniques are available, through which data can be interpreted.
(p. 29)

Penulis memberikan interpretasi obyektif dan mendalam sesuai dengan kerangka pikir dan narasi yang dibangun dalam tulisan ini dengan memperhatikan tujuan penelitian. Kemudian, data-data berupa studi pustaka dan data-data kuantitatif lainnya akan diolah dan dipaparkan dengan metode narasi penyajian data deskriptif-eksplanatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang dan Dinamika Politik Internasional

Beberapa karakteristik dari globalisasi modern membawa dampak dan

perubahan besar dalam dunia studi Hubungan Internasional, terutama sejak berakhirnya dua perang besar dunia. Para pengamat Hubungan Internasional melihat bahwa perubahan dinamika politik internasional terjadi karena adanya ciri khas yang dibawa oleh para pemenang dalam konflik besar antar negara. Misalnya saja kemenangan Jerman pada awal perang dunia II yang membawa sistem atau ide fasis ke negara Prancis (re: *Vichy France*) dengan membentuk negara boneka dengan sistem yang sama persis dengan Jerman dan kemenangan sekutu yang membawa angin besar demokrasi hampir ke seluruh penjuru dunia. Dapat dipastikan bahwa negara pemenang perang akan mempengaruhi ideologi negara jajahan. Selain itu, dalam ruang lingkup studi Hubungan Internasional sejak berakhirnya perang dingin (perang ideologi yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat) konsep mengenai keamanan, kekuatan, dan independensi mengalami banyak perubahan.

Misalnya saja paham realisme klasik yang menggaris bawahi pada isu *traditional security* dan *power*, diterjemahkan menjadi perlombaan kekuatan persenjataan/ alutsista. Realisme menitik beratkan pada negara sebagai fokus utama unit analisis dan aktor lain dilihat sebagai 'alat' negara. Negara hanya berfokus untuk memenuhi tujuan negara dan menggunakan militer sebagai kekuatan utama dalam meraih kepentingan nasional. Dengan kata lain, kepentingan vital negara berkaitan

dengan kedaulatan, identitas negara, dan keberlangsungan rakyat hanya bisa terjamin apabila sebuah negara memiliki instrumen 'militer' yang lebih kuat atau kurang lebih sama kuat dengan negara lainnya. Ketiga hal tersebut dalam pandangan realisme dapat dipetakan dari *national values* atau ideologi negara, karena negara dan *core interest* selalu selaras dengan ideologi negara. Karenanya paham realisme menggaris bawahi pada negara dan kepentingan utama negara yaitu masalah keamanan, (melindungi identitas atau bahkan mempengaruhi negara lain) (Jemadu, 2008). Bahkan sejak perang Peloponnesos pada 431-404 SM antara pasukan Sparta dan Athena sudah ada upaya untuk menaklukan wilayah lainnya akibat dari *Balance of Power* yang tidak tercapai. Thucydides mendeskripsikan bahwa perang Athena dan Liga Peloponnesos terjadi akibat kerajaan-kerajaan di wilayah Peloponesia merasa terancam dengan perkembangan dan kemajuan Athena, khususnya bidang militeristik. Oleh karena itu, konsep-konsep kunci mengenai stabilitas sistem internasional hanya bisa tercapai apabila negara-negara memiliki kekuatan militer yang setara (Kegley, 1993).

Realisme untuk pertama kalinya dalam sejarah studi Hubungan Internasional atau sejarah hubungan antar negara mengalami kejatuhan total. Hal ini disebabkan adanya pergeseran fokus internasional dan pemahaman dalam memaknai 'kepentingan internasional baru'. Dimulai dari kegagalan realisme

dalam menjelaskan apa yang terjadi pada perang dingin tahun 1947-1991, di mana konflik besar di antara dua hegemoni besar tidak diselesaikan dengan adu senjata atau perang terbuka. Hingga pada akhirnya para peneliti Hubungan Internasional dan para pemerhati politik mempertanyakan dominasi dari paradigma Realisme, lalu bagaimana hubungannya dengan kepentingan negara pada saat itu. Hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan, karena perubahan paradigma bukan hanya menggambarkan revolusi dari 'pandangan' yang biasa dikenal sebagai teori Hubungan Internasional dan dominasinya dalam kajian keilmuan, tetapi juga menandakan bahwa adanya perubahan besar dalam pola interaksi negara kemudian pada akhirnya pada transformasi dalam politik global (Mansbach, 1988).

Menurut Jemadu (2008), setidaknya ada empat permasalahan besar dalam akhir masa perang dingin yang tidak bisa dijelaskan oleh realisme klasik. Pertama adalah bagian penyelesaian konflik. Realisme tidak pernah dapat membayangkan bahwa sebuah kekuatan militer yang besar (salah satu hegemoni dunia) dapat membubarkan diri secara sukarela. Apalagi, pembubaran Uni Soviet dikarenakan masalah ekonomi negara (bukan alat utama negara menurut pandangan realisme). Kedua, penjelasan bahwa negara merupakan aktor uniter dan dapat mengambil keputusan sesuai dengan idealisme yang dianut negara. Pandangan ini memiliki kelemahan besar,

karena negara otoriter seperti Uni Soviet bahkan Jerman Nazi masih ada pergolakan dalam proses pengambilan keputusan.

Ketiga, kegagalan realisme dalam memahami dan menjelaskan peningkatan kerja sama regional dalam bidang ekonomi dan membentuk ikatan 'interdependensi' antar negara di dalamnya (co: NAFTA, ASEAN, APEC, dan EU). Keempat, tidak dapat menjelaskan dinamika perang dan perdamaian dalam interaksi internasional, secara khusus mengenai perang dingin, sementara pandangan realis memaklumkan perang terbuka sebagai satu-satunya jalan utama untuk menyelesaikan konflik. Menurut berbagai pemerhati politik global, realitas internasional berubah karena ada tuntutan baru dalam sistem internasional yaitu kepentingan ekonomi.

Kebangkitan kapitalisme ditunjukkan dengan semakin banyaknya regionalisme baru (regionalisme yang berfokus pada kerja sama ekonomi dalam kawasan) dan rejim internasional baru seperti *World Trade Organization* (WTO). Kepentingan ekonomi bagi negara-negara pasca perang dingin seolah mengganti kepentingan dan kebutuhan utama negara terhadap alutsista. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi serta kekayaan negara dianggap lebih penting dari pada jumlah alutsista yang ada di sebuah negara. Perubahan isu dan kebutuhan negara juga didorong akibat runtuhnya sistem bipolar internasional menjadi multi polar dengan

terbentuknya kerja ekonomi kawasan, seperti *Regional Trade Agreement* (RTA).

Hal ini terjadi sampai dengan saat ini seperti integrasi MEA pada tahun 2015, pembentukan RTA baru antara ASEAN dengan Korea Selatan, dengan Tiongkok, dan Jepang semakin memperkuat fakta bahwa tantangan saat ini adalah bertahan dalam era kapitalisme saat ini. Ditambah dengan fakta kebangkitan India dan Tiongkok dalam bidang perekonomian global seolah memberikan tantangan baru bagi negara-negara dunia termasuk Indonesia dalam menghadapi arus kapitalisme dan realitas baru.

Kebangkitan perekonomian tidak hanya memberikan tantangan tetapi juga sekaligus peluang. Indonesia memiliki sumber daya geografis dan sumber daya manusia cukup besar di dunia. Mengingat keunggulan geografis dan ontologis bumi pertiwi sudah sewajarnya Indonesia memiliki cita-cita untuk masuk sebagai salah satu negara maju di dunia. Namun, tentunya hal ini hanya dapat diwujudkan apabila Indonesia memiliki arah diplomasi yang tepat dan kuat. Banyak kalangan pemerhati politik dan ekonomi memberikan komentar positif saat seorang pengusaha asal Solo, Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7. Hal tersebut terkait dengan keunggulan Joko Widodo dalam mengelola bisnis dan dapat dipastikan hal ini akan mempengaruhi kebijakan pemerintah di bawah masa kepemimpinannya.

Analisis Individu Joko Widodo dan Decision Making

Optimisme terhadap pengaruh terpilihnya Joko Widodo menjadi Presiden dapat dibahas secara ilmiah. Hal tersebut terjadi bukan hanya dikarenakan intuisi para pengamat tetapi berdasarkan indikator analisis tingkat individu. Salah satunya adalah *Individual Level Analysis* John Rourke. Dalam buku berjudul *International Politics on World Stage*, Rourke (2008) menyebutkan setidaknya ada empat faktor utama dalam bagian analisis individu untuk melihat relasinya dengan kebijakan yang dibuat oleh sebuah pemerintahan, antara lain: *Personality; Ego and Ambition; Political History and Personal Experience; Perception and Operational Reality*. Dengan menggunakan empat faktor tersebut penulis melihat bagaimana Presiden Joko Widodo mempengaruhi pengaruh diplomasi ekonomi sebagai prioritas kebijakan luar negeri Indonesia.

Personality

Ada beberapa cara dalam mengkategorikan kepribadian dari seorang pemimpin politik. Tetapi ada dua kategori umum yang biasa digunakan dalam menentukan kepribadian seorang pemimpin politik yaitu *active-passive* dan *positive-negative*. Aktif-pasif berfokus untuk melihat apakah seorang pemimpin politik bersifat aktif, membuat terobosan baru/ seorang inovator dalam membuat kebijakan *anti-mainstream* untuk menentukan arah baru atau sebaliknya bersifat reaktif, responsif terhadap kenyataan hubungan internasional yang

sudah ada, dan menyesuaikan diri terhadapnya. Sedangkan positif-negatif berfokus untuk melihat apakah seorang pemimpin dapat merasa leluasa ditengah ketidakpastian lingkungan politik, atau justru merasa tertekan dan dibatasi oleh keadaan. Pada bagian ini penulis akan berfokus pada pengkategorian aktif-pasif.

Dalam sebuah wawancara di istana negara pada tanggal 20 Oktober 2015 lalu Presiden Joko Widodo mendapat sebuah pertanyaan mengenai gaya kepemimpinannya sebagai Presiden dan kesannya selama menjabat. Dalam menjawab pertanyaan tersebut Presiden menjawab "Latar Pendidikan saya dan *background* pengusaha saya memang tidak terlalu berkaitan dengan karir politisi saya. Namun nilai-nilai kejujuran, kerja keras dan ketekunan yang saya dapat selama hidup ini yang mendukung dan membentuk karakter saya" (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015).

Konfirmasi dari Presiden Joko Widodo memberikan gambaran kepada semua orang bahwa pengambilan keputusan dan prinsip dasarnya dalam memimpin sebagai Presiden didasarkan pada pengalaman hidup yang selama ini berhasil membentuk kepribadiannya, serta nilai-nilainya di dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, tidak heran Presiden Joko Widodo dikatakan berhasil apabila dilihat dari perubahan-perubahan besar dalam bidang perekonomian bangsa yang telah berhasil dibuat sejauh ini. Dengan demikian penulis menemukan adanya korelasi antara kepribadian pemimpin dengan tujuan/ visi-misi suatu

organisasi (dalam hal ini negara). Salah satunya adalah perihal etos kerja keras yang berusaha diturunkan oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh tatanan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, yang mana hal tersebut dikenal dengan jargon "kerja, kerja, kerja!"

Bentuk nyata dari hubungan antara kepribadian Presiden dan dampaknya terhadap kebijakan pemerintah adalah Joko Widodo telah membuat banyak perubahan semenjak dirinya menjadi Presiden yang jauh berbeda dari pendahulunya, yaitu mencapai tujuan reformasi perekonomian, dan pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh. Presiden Joko Widodo melakukan terobosan besar, bahkan sejak dirinya menjadi Walikota Solo tahun 2005 silam, yaitu dengan merangkul pihak asing untuk membangun daerah. Khusus daerah DKI Jakarta, ada proyek-proyek infrastruktur seperti (*Mass Rapid Transit* Jakarta) MRT Jakarta yang ikut didanai oleh asing. Kemudian untuk Indonesia semasa Joko Widodo menjadi Presiden proyek-proyek pembangunan pelabuhan juga didanai oleh asing. Keseriusan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sampai dengan lima persen pertahun juga pernah disampaikan oleh Presiden (Saputri, 2017). Selain itu, kegigihan pada karakter Presiden juga ditunjukkan dengan memastikan visi-misinya berjalan lancar dimana ia tidak segan untuk memecat siapa pun yang dianggap menghambat laju perubahan Indonesia kearah yang lebih baik,

misalnya *reshuffle* Menteri atau pemberhentian PNS/ASN.

Presiden Joko Widodo juga membuat terobosan baru dalam dunia maritim Indonesia demi menjaga kedaulatan dan sumber kekayaan alam Indonesia, yaitu membuat kebijakan penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Meskipun hal itu sempat membuat para pengamat internasional dan negara-negara di sekitar kawasan merasa tidak nyaman dengan tindakan Indonesia. Ditambah dengan munculnya konsep *Global Maritime Fulcrum*, yaitu Indonesia sebagai poros utama maritim dunia. Hal ini membuat semakin jelas bahwa Joko Widodo merupakan sosok kepribadian yang aktif, dan merupakan seorang inovator dari pada seorang reaktor (*active approach*).

Ego and Ambition

Kebijakan pemerintahan juga dapat dipengaruhi oleh ego dan ambisi pribadi dari seorang pemimpin. Pada masa kepemimpinan Joko Widodo yang sangat transaksional, ia menempatkan prioritas efektivitas (*low cost*) dan efisiensi dalam setiap proyek pemerintahan. Sehingga Joko Widodo tidak segan untuk memecat pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak dapat memenuhi target (dinilai lambat) atau menyalahgunakan kewenangan, karena tidak sesuai dengan tujuan pemerintah.

Penulis melihat ambisi utama dari seorang Presiden Joko Widodo adalah pertumbuhan ekonomi bangsa dan

negara, demi tercapainya tujuan dan cita-cita negara sesuai dengan UUD 1945 yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo dan ambisinya dalam membangun perekonomian dapat dilihat dari setiap kebijakan yang dibuat oleh rezim kepemimpinannya (Alvian et al., 2018). Misalnya saja pemotongan aturan/persyaratan surat izin usaha, serta kehadiran OSS (*Online Single Submission*) pada masa pemerintahan periode pertama, yang mana dalam hal ini ada *trade off* yang dilakukan pemerintah, yaitu dengan memotong administrasi (termasuk pajak) supaya semakin banyak pelaku bisnis asing maupun domestik yang membuka bisnis di Indonesia.

Kehadiran OSS di kaca mata awam, merupakan sistem e-registrasi biasa saja. Namun, dalam sudut pandang ekonomi hal ini merupakan perubahan yang membawa dampak positif bagi para pelaku usaha di Indonesia, karena dapat memberikan jalan pintas untuk perizinan usaha bagi para pelaku ekonomi. Di sisi lain, ada pihak-pihak yang diragukan dalam proses penyederhanaan sistem registrasi ini. Misalnya, seperti pendapatan negara (dari pajak/biaya administrative lainnya). Selain itu, hal ini juga merugikan pihak-pihak 'ketiga', yang sering memanfaatkan kesempatan dalam administrasi pelik untuk memperoleh kesempatan demi keuntungan pribadi. Dalam pidato Presiden di istana negara pada 2016 silam, beliau menekankan bahwa administrasi pelik yang selama ini

terjadi di Indonesia menghambat laju pertumbuhan, dan hal itu tidak sesuai dengan strategi dan ambisinya (KemenkoPolhukam, 2016).

Ambisi Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan perekonomian daerah dan negara juga sangat terlihat dengan minat pemerintah untuk meningkatkan konektivitas pembangunan infrastruktur perekonomian dan meningkatkan investasi asing untuk masuk. Hal ini terlihat dari sejak awal dirinya masuk ke dalam dunia politik, dari Solo (*Spirit of Java*), revitalisasi Jakarta, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran di seluruh Indonesia. Selain itu, ada beberapa kebijakan yang direvisi dan disesuaikan guna menjaga iklim bisnis tetap sesuai kebutuhan, dan dapat menunjang tujuan utama yaitu peningkatan dan pertumbuhan dalam bidang perekonomian.

Political History and Personal Experience

Presiden Joko Widodo merupakan seorang pengusaha dan sebelum terjun ke dunia politik pada tahun 2005 silam, tidak pernah sekalipun terlibat dalam kegiatan politik kedaerahan. Hal ini membuat masyarakat mempertanyakan kemampuannya. Lebih jauh penulis menemukan bahwa Presiden Joko Widodo terlahir dalam sebuah keluarga sederhana di Surakarta. Ayahnya Noto Mihadjo merupakan seorang pengusaha kayu di Surakarta pada saat itu. Kemudian krisis pada pertengahan menjelang akhir 1960-an membuat ayahnya harus beralih profesi menjadi

seorang sopir bus kota. Krisis tersebut membawa perubahan besar pada fokus dan cara hidup seorang Joko Widodo. Misalnya harus membantu sang ibu setelah pulang sekolah untuk berjualan kayu di pasar. Dalam perjalanannya Joko Widodo muda menemukan pendekatan berjualan yang sama sekali berbeda dengan penjual kayu lain di pasar kota, yaitu dengan 'membawa kayu kepada pelanggan'. Joko Widodo muda menawarkan kayu-kayu yang hendak dijual dari pintu ke pintu. Joko Widodo muda juga pernah terpaksa berpindah rumah akibat penggusuran pemda (Mahardi, 2018). Pengalaman hidup yang pahit membuat seorang Joko Widodo unik dan memiliki pendekatan yang berbeda dari pada politikus pada umumnya.

Pengalaman pahit seorang Joko Widodo muda menghasilkan pendekatan yang sangat terkenal pada masa pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012 silam, yaitu blusukan dan reklamasi. Tidak hanya ciri khas pada pendekatannya dengan masyarakat, fokus utama pemerintahan Joko Widodo juga terasa sangat transaksional. Misalnya saja pada waktu menjabat sebagai Walikota Solo, Joko Widodo menjadikan prioritas utama kepemimpinannya untuk *rebranding* Surakarta (*Spirit of Java*). Solo pada waktu itu menjadi salah satu kota terkumuh di Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan jumlah pedagang kaki lima membludak dan tidak tertib. Seorang Joko Widodo menjadi Walikota pertama yang berhasil menyelesaikan masalah tersebut dengan merelokasi 5.817 pedagang kaki

lima (PKL) tanpa menggunakan kekerasan. Joko Widodo berulang kali mengajak PKL yang ada di kota Solo untuk berdiskusi dan memberikan logika sederhana, “Jika Solo menjadi kota bersih, pasti investor masuk dan jika investor masuk, para pedagang akan diuntungkan. Karena akan ada pembangunan infrastruktur dan turis akan berdatangan jika Solo menjadi kota bersih” (Zaenuddin, 2012). Latar belakang dan kisah kehidupan Presiden Joko Widodo muda, membentuknya menjadi pemimpin yang *low profile*, dekat dengan masyarakat, dan menempatkan kepentingan kesejahteraan umum (kepentingan ekonomi) sebagai prioritas utama.

Perception and Operational Reality

Pembuat kebijakan sangat dipengaruhi oleh persepsi atau pengetahuan dasar terhadap segala sesuatu terlepas dari apakah penilaian tersebut benar atau tidak (belum tentu valid). Bagi Presiden Joko Widodo latar belakangnya sebagai pengusaha juga membawa dampak terhadap persepsinya, salah satu yang paling berpengaruh adalah pandangan bahwa keuntungan adalah hal utama. Hal ini mempengaruhi pendekatan Indonesia dengan negara lain, misalnya saja dalam kunjungan luar negeri Presiden Joko Widodo selama periode pertama sebanyak 53 kali, pasti selalu membahas tentang kerja sama ekonomi. Selain dari pada ‘keperluan tersebut’ (non-ekonomi) yang diutus untuk menghadiri pertemuan nasional lainnya adalah Wakil Presiden

atau Menteri Luar Negeri, termasuk pada konferensi PBB (Hakim, 2019).

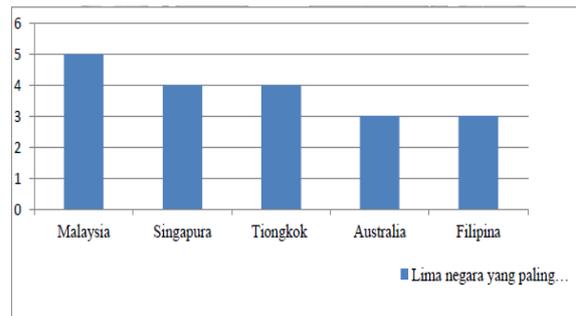
Selain pergi ke luar negeri, Presiden juga membuat prioritas kerangka pembangunan dalam negeri guna menyambut investasi asing. Prioritas pembangunan infrastruktur bahkan sampai meningkatkan utang negara. Pada tahun 2015 utang negara sebanyak Rp. 3.089 triliun (dengan rasio 27% PDB); pada tahun 2017 utang negara menjadi Rp. 3.549 triliun (dengan rasio 28% PDB); pada akhir tahun 2017 utang negara menjadi Rp. 3.938 triliun (dengan rasio 29,2% PDB); pada akhir tahun 2018 utang negara menjadi Rp. 4.136 triliun. Meskipun peningkatan hutang cukup besar (Rp. 1.057 triliun dari tahun 2015-2018) di masa pemerintahan Joko Widodo, hal tersebut dapat dipahami dari perspektif pengusaha, yang mana hutang besar jika dikelola dengan tepat dapat memberikan keuntungan yang jauh lebih besar. Menurut Presiden Joko Widodo, hutang tersebut tepat guna karena hampir semuanya dialihkan pada pembangunan infrastruktur demi keuntungan jangka panjang.

Rational Decision Making Proses (Diplomasi Ekonomi)

Berdasarkan empat faktor sebelumnya, setidaknya ada dua faktor utama yang dapat diamati dan sangat berhubungan dengan pemilihan pendekatan diplomasi ekonomi sebagai salah satu pilar utama hubungan luar negeri RI, yaitu *perception and operational reality* dan *personality*. Setelah diketahui bagaimana pandangan

transaksional Joko Widodo, kepribadiannya menjadi faktor pelengkap dalam mencapai tujuan dari persepsi transaksional Joko Widodo. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa politik internasional modern saat ini sangat kental dengan perlombaan penguasaan modal/ akumulasi kapital (co: *Trade War US-China*). Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui kepribadian Joko Widodo. Jika bersifat reaktif Indonesia hanya akan dihanyutkan oleh perlombaan dua kekuatan ekonomi global. Sikap Indonesia dengan menyatakan diri sebagai *Global Maritime Fulcrume* merupakan upaya aktif dari pemerintahan Joko Widodo untuk mengatakan kepada dunia saat ini bahwa Indonesia setara dengan negara lainnya, dan dapat memanfaatkan asetnya sesuai dengan kebutuhan/ *national interest*, kemudian negara mana pun harus menghormati hal ini (Humas LIPI, 2020).

Joko Widodo mempercayai bahwa dengan demikian, Indonesia dapat menentukan langkahnya sendiri demi kemajuan perekonomian bangsa. Salah satunya adalah ketepatan momentum antara kehadiran Joko Widodo dan kelahiran Masyarakat Ekonomi ASEAN (re: *MEA Blue Print 2015*). Dibandingkan dengan kunjungan luar negeri dan kerja sama yang terjalin antara Indonesia dengan Amerika Serikat serta negara-negara Eropa, Presiden lebih banyak mengunjungi dan mengadakan kerja sama dengan negara-negara Asia.



Gambar 1. Diagram Kuantitas Destinasi Kunjungan Kenegaraan Presiden Joko Widodo tertinggi (2014-2018). Sumber: Setkab.go.id

Sebagai pemain aktif, Indonesia harus leluasa dalam menjalin kerja sama dengan negara mana pun di dunia. Oleh karena itu, Indonesia harus menentukan alat kebijakan luar negeri yang dianggap sesuai dengan prinsip aktif tersebut. Diplomasi ekonomi adalah jawabannya. Sudah sejak awal masa pemerintahan Joko Widodo diplomasi ekonomi menjadi salah satu pilar utama yang sangat diperkuat perannya. Penulis mengidentifikasi hal tersebut dengan menggunakan *Rational Actor Model-Foreign Policy Decision Making Process*, seperti gambar di bawah ini.



Gambar 2. *Rational Actor Model-Foreign Policy Decision-Making Process*. Sumber: Di buat oleh penulis

Dalam model aktor nasional keputusan diambil setelah menyaring secara ketat tujuan dan prioritas dari

kepentingan negara. Kemudian, melihat alternatif yang bisa diimplementasikan dan menguntungkan dengan 'kerugian/pengeluaran' seminim mungkin. Dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan luar negeri ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dan dalam aspek ini keistimewaan dari sosok pemimpin memainkan peran penting serta mempengaruhi keputusan, termasuk pandangan subyektif dari sang pemimpin politik. Berikut adalah analisis penulis *Rational Decision Making* Joko Widodo terkait diplomasi ekonomi. Dalam kebanyakan proses pengambilan keputusan rasional ada beberapa langkah yang dilakukan oleh aktor rasional, antara lain: (1) Menentukan tujuan; (2) Identifikasi dan analisa setiap kemungkinan/alternatif pilihan; (3) Investigasi konsekuensi dari tiap alternatif; (4) Pilih pilihan yang paling menguntungkan.

Pertama adalah realitas bahwa dunia internasional saat ini mengedepankan perlombaan akumulasi kapital (co: proteksionisme Trump, *Trade War*, kebangkitan India) menyebabkan Indonesia harus siap untuk menghadapi arus persaingan kapital global. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pemerintahan Joko Widodo, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedua adalah mengidentifikasi setiap kemungkinan, dimana Indonesia sebagai negara besar dengan potensi penduduk nomor empat di dunia dan pemimpin di kawasan Asia Tenggara menjadikan Indonesia sebagai

asaran eksploitasi bagi negara-negara besar. Dengan pertimbangan demikian, Indonesia memiliki peluang yang lebih baik jika turut aktif dalam rantai produksi global, bukan hanya sebagai pasar tempat barang berlabuh atau 'korban' kapitalisme.

Ketiga, mengenali konsekuensi dari pilihan Indonesia untuk turut aktif (persepsi Joko Widodo) dalam perlombaan akumulasi kapital modern. Dengan keterbukaan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara lain (bebas), Indonesia memiliki peluang untuk dapat menjadi aktor yang mengatur dan menang. Di sisi lain, keterbukaan Indonesia terhadap seluruh negara (termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat) dapat menjadi bumerang, yaitu negara lain menguasai faktor produksi Indonesia. Keempat, berdasarkan pilihan yang ada bagi Indonesia, yang tentunya dipengaruhi oleh seorang Presiden Joko Widodo, diplomasi ekonomi menjadi jawaban yang tepat. Indonesia dapat menjadi bagian dari rantai produksi global. Tidak hanya itu, bahkan dengan adanya investasi dan kematangan faktor produksi dalam negeri (domestik), Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang disegani dunia.

KESIMPULAN

Proses pengambilan keputusan dalam sebuah negara memang terbilang sangat kompleks. Tetapi dalam hampir segala aspek kepala pemerintahan mempengaruhi warna kebijakan yang akan diambil dalam satu periode

berikutnya. Oleh karena itu, analisis level individu merupakan salah satu metode tepat untuk para peneliti dan pemerhati hubungan internasional dalam melihat arah kebijakan suatu pemerintahan terkait isu internasional. Seperti yang terjadi di Indonesia, di mana Indonesia dalam beberapa dekade hanya berkutat pada pemulihan pasca krisis Asia 1997 dan krisis 2008 silam. Stagflasi, menjadi ciri khas perekonomian Indonesia dalam 2 dekade kebelakang. Namun, penguatan peran diplomasi ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat memberikan harapan dan sikap optimis bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa bangsa ini sedang menuju kepada kemakmuran dengan pertumbuhan ekonomi secara merata dari pada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, R.A., Putri, G.C., & Ardhani, I. (2018). Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2), 77-91. <https://doi.org/10.18196/hi.62112>
- Buszynski, L. (1992). Southeast Asia in the Post-Cold War Era: Regionalism and Security. *Asian Survey*, 32(9), 830-847. <https://doi.org/10.2307/2645074>
- DPR-RI. (2001). *Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)*. DPR-RI.
- Fitriani & Panduwinata, V. C. (2018). *Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015-2018)*. CSIS Working Paper Series.
- Hakim, R.N. (21 Oktober 2019). *Wakili Jokowi, Ma'ruf Amin Terbang ke Jepang Hadiri Penobatan Kaisar*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/21/06013241/wakili-jokowi-maruf-amin-terbang-ke-jepang-hadiri-penobatan-kaisar>
- Humas LIPI. (16 Maret 2020). *LIPI, Global Maritime Fulcrum Dalam Konteks Indonesia Sebagai Negara Maritim*. <http://ipsk.lipi.go.id/index.php/berita/699-lipi-global-maritime-fulcrum-dalam-konteks-indonesia-sebagai-negara-maritim>
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Graha Ilmu.
- Jenkins, D. (2010). One Reasonably Capable Man: Soeharto's Early Fundraising. In E. Aspinall, *Soeharto's New Order and Its Legacy* (pp. 17-25). ANU Press.
- Kegley, C. (1993). The Neoidealist Moment in International Studies? Realist Myths and the New International Realities. *International Studies Quarterly*, 37(2), 131-146. <https://doi.org/10.2307/2600765>
- KemenkoPolhukam. (20 Oktober 2016). *Perangi Pungutan Liar, Presiden Jokowi: Pungli Lemahkan Daya Saing Nasional*. <https://polkam.go.id/perangi-pungutan-liar-presiden-jokowi-pungli-lemahkan-daya-saing-nasional/>

- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. Sage.
- Lesmana, T. (2008). *Dari Soekarno Sampai SBY*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lundry, C. (2018). Assessing Indonesia's Foreign Policy under Joko Widodo. *Asia Policy*, 13(4), 30-35.
- Mahardi, D. (2018). *Indonesia Butuh Jokowi*. Bhuana Ilmu Populer.
- Mansbach, H. F. (1988). *The Elusive Quest: Theory and International Politics*. University of South Carolina Press.
- Margiansyah, D. (2020). Revisiting Indonesia's Economic Diplomacy In The Age of Disruption: Towards Digital Economy and Inovation Diplomacy. *Journal of ASEAN Studies*, 8(1), 15-39. <https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6433>
- Maxwell, J. C. (2016). *The Leadership Handbook*. Mic Publishing.
- Mintz, A. (2004). How Do Leaders Make Decisions?: A Poliheuristic Perspective. *Journal of Conflict Resolution*, 48(1), 3-13. <https://doi.org/10.1177/0022002703261056>
- Rourke, J. T. (2008). *International Politics on The World Stage*. McGraw-Hill.
- Sabaruddin, S.S. (2019). *Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 69-90. <http://dx.doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2545.69-90>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (20 Oktober 2015). *Ditanya Wartawan Cilik, Presiden Jokowi: Tidak Boleh Tunjukkan Sedih, Harus Optimistis*. <https://setkab.go.id/ditanya-wartawan-cilik-presiden-jokowi-tidak-boleh-tunjukkan-sedih-harus-optimistis/>
- Saputri, M. (17 Agustus 2017). *RAPBN 2018, Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen*. *Tirto.id*. <https://tirto.id/rapbn-2018-jokowi-targetkan-pertumbuhan-ekonomi-54-persen-cuLH>
- Thu, H. L. (2018). Australia and ASEAN: Together for the sake of a New Multipolar World Order. *Security Challenges*, 14(1), 26-32.
- Waltz, K. N. (1959). *Man the State and War*. Colombia University Press.
- Zaenuddin, M. (2012). *Jokowi, dari jualan kursi hingga dua kali mendapatkan kursi: kisah walikota yang inspiratif*. Gramedia.

TENTANG PENULIS

Jhon Maxwell Yosua Pattinussa menyelesaikan studi S1 Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Pelita Harapan Tangerang dan S2 Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Pelita Harapan Jakarta. Fokus penelitian yang diminati adalah kajian-kajian ekonomi internasional, dinamika ekonomi politik global, isu ekonomi dan lingkungan dalam lingkup internasional.



CARA SITASI ARTIKEL INI:

Pattinussa, J.M.Y. (2021). Pengaruh Presiden Joko Widodo pada Penguatan Peran Diplomasi
Ekonomi di Indonesia. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 1(2), 85-
104. DOI: 10.31957/pjdir.v1i2.1734